

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 27 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 27 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN STATUS DESA TOLANDONA MENJADI  
KELURAHAN TOLANDONA KECAMATAN SANGIA  
WAMBULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di Wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Sangia Wambulu, perlu merubah status Desa Tolandona yang berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan menjadi Kelurahan Tolandona ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Tolandona Menjadi Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu ;

2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sangia Wambulu ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 21 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

*d a n*

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA  
TOLANDONA MENJADI KELURAHAN  
TOLANDONA KECAMATAN SANGIA  
WAMBULU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
2. Camat adalah Camat Sangia Wambulu;
3. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Tolandona ;
4. Lurah adalah Lurah Tolandona.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

- (1) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu dalam Wilayah Kabupaten Buton yang merupakan perubahan status dari Desa Tolandona.
- (2) Kelurahan Tolandona berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Sangia Wambulu.

## Pasal 3

(1) Wilayah Kelurahan Tolandona terdiri atas :

- a. Lingkungan Bantea ;
- b. Lingkungan Bone ;
- c. Lingkungan Bawonauwe ;
- d. Lingkungan Limbo.

(2) Penyebutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perubahan penyebutan nama dusun menjadi lingkungan sesuai dengan peruntukan bagi Kelurahan.

## Pasal 4

Luas wilayah Kelurahan Tolandona adalah sama dengan luas wilayah Desa Tolandona.

## Pasal 5

(1) Kelurahan Tolandona mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baruta Lestari ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Buton ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tolandona ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Doda Bahari ;

(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Penetapan batas Wilayah Kelurahan Sangia Wambulu secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kelurahan Tolandona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Desa serta personil Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolandona diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(2) Perangkat Pemerintahan Desa Tolandona tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai ditetapkan perangkat Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Pada saat ditetapkan Kelurahan Tolandona maka seluruh kekayaan atau asset Desa Tolandona menjadi kekayaan Kelurahan Tolandona.

## Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI BUTON,

*Cap / Ttd*

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 27 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON*

*TAHUN 2005 NOMOR : 27*